



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
INSPEKTORAT

Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154
Telepon: (061) 4150461 - 4524309. Faksimile: (061) 4150194
Laman: inspektorat.sumutprov.go.id Pos-el: inspektorat@sumutprov.go.id

Medan, 16 Agustus 2023

Nomor : 700-1.2/2329 / ITPROVSU
Sifat : Sangat Rahasia
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Provinsi Sumatera Utara

di
Medan

Berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara, dengan ini disampaikan:

1. Evaluasi dilaksanakan oleh Tim Inspektorat sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor 700/555/INSP/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023 selama 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal 19 Juni 2023 s.d 05 Juli 2023.
2. Hasil evaluasi telah dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi sebagaimana terlampir.
3. Secara garis besar hasil evaluasi diuraikan sebagai berikut:
 - a. Uraian hasil evaluasi

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **75,25** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**, perlu perbaikan sehingga bisa menjadi kategori A (Memuaskan) dan kategori AA (Sangat Memuaskan). Nilai tersebut merupakan akumulasi dari penilaian:

- 1) Perencanaan Kinerja mendapat nilai akuntabilitas 24,60 dengan capaian 82%.

- 2) Pengukuran Kinerja mendapat nilai akuntabilitas 23,70 dengan capaian 79%.
 - 3) Pelaporan Kinerja mendapat nilai akuntabilitas 13,05 dengan capaian 87%.
 - 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapat nilai akuntabilitas 13,90 dengan capaian 56%.
- b. Penjelasan lebih lanjut terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 sebagai berikut:
- 1) Perencanaan Kinerja
Masih terdapat penetapan indikator kinerja pejabat eselon III, eselon IV dan belum sesuai dengan rencana aksi/program kegiatan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama.
 - 2) Pelaporan Kinerja
Laporan Kinerja secara berkala yaitu triwulan dan semester belum disusun sebagai bahan evaluasi akuntabilitas untuk penyempurnaan dokumen perencanaan dalam tahun berjalan melalui program kegiatan yang telah ditetapkan.
 - 3) Laporan Kinerja tahunan belum menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
Laporan Kinerja tahunan belum memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.
 - 4) Evaluasi Kinerja
Belum terdapat status tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dalam bentuk matriks dari Inspektorat Provsu.
- c. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara agar menginstruksikan kepada staf serta jajarannya untuk melakukan perbaikan-perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagai berikut:
- 1) Melakukan penetapan indikator kinerja dan target eselon III dan eselon IV yang terukur dan selaras dengan indikator kinerja dalam rencana aksi/program kegiatan dan target yang ditetapkan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama.(memenuhi kriteria *SMART*)
 - 2) Menyusun Laporan Kinerja secara berkala yaitu triwulan dan semester sebagai bahan evaluasi akuntabilitas untuk penyempurnaan dokumen

perencanaan dalam tahun berjalan melalui program kegiatan yang telah ditetapkan.

- 3) Menyusun laporan kinerja tahunan yang menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
 - 4) Menyusun laporan kinerja tahunan yang memberikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional.
 - 5) Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari Inspektorat Provsu dan meminta hasil tindak lanjut dalam bentuk maktris.
4. Laporan Hasil Evaluasi tersebut pada angka 2 dan angka 3 merupakan dokumen pengawasan yang bersifat rahasia untuk tidak diberikan dan disampaikan kepada pihak yang tidak berkepentingan.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilakukan perbaikan sehingga bisa menjadi kategori A (memuaskan) atau kategori AA (sangat memuaskan)


INSPEKTUR
LASRO MARBUN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19641201 198701 1 002

Tembusan:

1. Gubernur Sumatera Utara.
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Biro Organisasi Setdaprovsu.